

# PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019





# OUTLINE

1

- DASAR HUKUM DAN SUBSTANSI RAKORTEK

2

- KESIAPAN DUKUNGAN TUAN RUMAH PENYELENGGARA



# 1. DASAR HUKUM DAN SUBSTANSI RAKORTEK

## A. DASAR HUKUM

Pasal 258 Ayat 3 & Pasal 259 UU Nomor 23 Tahun 2014

### SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan **sinkronisasi dan harmonisasi** dengan Daerah untuk **mencapai target pembangunan nasional**.



### DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS

Untuk **mencapai target pembangunan nasional** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan **koordinasi teknis pembangunan** antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

PASAL 259 AYAT 1

### ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN

Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

PASAL 259 AYAT 2

### ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR

Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

PASAL 259 AYAT 3

### JENIS-JENIS KORTEK

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap **perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah**.

PASAL 259 AYAT 4

COORDINASI KORTEK



## B. SUBSTANSI RAKORTEK

- Kortekrenbang merupakan bentuk pelaksanaan **sinkronisasi** dan **harmonisasi** perencanaan antara pusat dan daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional
- **Target pembangunan nasional** merupakan kontribusi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga harus **dijabarkan** ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan



## Tujuan Rakortek

- Penyelarasan **program, kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran** pembangunan nasional antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
- Terwujudnya pencapaian target pembangunan nasional secara **sinergis** antara Pusat dan Daerah



## Output Rakortek

- **Kesepakatan** antara pusat dan daerah terhadap program/kegiatan untuk pencapaian target pembangunan nasional.
- Bahan **input** bagi Pusat dalam penyempurnaan rancangan awal **RKP** dan sebagai bahan input bagi Daerah dalam penyempurnaan rancangan awal **RKPD**



## Fungsi Forum Rakortek

- Melakukan **konfirmasi** terhadap program prioritas nasional, kesiapan lokasi dan target program prioritas
- Mengidentifikasi dan memastikan **dukungan daerah** dalam pencapaian target pembangunan yang menjadi prioritas nasional
- Mengidentifikasi dan memastikan **dukungan pusat** melalui APBN dalam pencapaian target pembangunan yang menjadi prioritas daerah



## Pembagian Tugas

Kemendagri	K/L	Bappenas	Pemerintah Daerah	Notulen (Kemendagri dan Bappenas)
<p>Mengarahkan dan mengatur jalannya pembahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Time Management</li> <li>2) Substansi Pembahasan</li> <li>3) Kesepakatan Pembahasan</li> </ol>	<p>Memberikan informasi dan memasukan substansi terhadap Proyek K/L dan Proyek Daerah yang diusulkan Daerah</p>	<p>Memberikan justifikasi atas Proyek K/L dan Proyek Daerah yang mendukung Prioritas Nasional</p>	<p>Memberikan masukan terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kondisi dan Kebutuhan pembangunan di daerah</li> <li>2) Urgensi Proyek Daerah dalam mendukung PN</li> <li>3) Kesiapan lokasi dan rasionalisasi target Proyek K/L</li> </ol>	<p>Mencatat dan Mendokumentasikan Hasil Kesepakatan Rakortek</p>





## Tindak Lanjut Rakortek

### 1. Pemerintah Pusat

- Penyempurnaan Program, Kegiatan, Proyek K/L, Lokasi dan Target dalam RKP
- Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L
- Menjadi dasar pembahasan dalam Musrenbangnas

### 2. Pemerintah Daerah

- Penyempurnaan program, kegiatan, proyek daerah, lokasi dan anggaran daerah yang mendukung PN dalam Ranwal RKPD dan Ranwal Renja PD
- Menjadi dasar pembahasan dalam Kortek Provinsi dan Musrenbang Provinsi



## 2. KESIAPAN DUKUNGAN TUAN RUMAH PENYELENGGARA

### 1. Penyelenggaraan Rakortek Region I (Wilayah Barat)

Lokasi penyelenggaraan Rakortek Region I (Wilayah Barat) di Grand Inna Hotel, Jln. Gereja No. 34 Padang, Sumatera Barat, dilaksanakan tanggal 25 Februari –1 Maret 2019. dengan peserta dari 17 provinsi (Aceh, Sumut, Riau, Kep. Riau, Sumbar, Sumsel, Babel, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim dan Bali). Dengan peserta pusat dan daerah  $\pm 1000$  orang.

### 2. Penyelenggaraan Rakortek Region II (Wilayah Timur)

Lokasi penyelenggaraan Rakortek Region II (Wilayah Timur) di Gran Sinyur Hotel, Jln. A.R.S Mohammad No. 7 Balikpapan, Kalimantan Timur, dilaksanakan tanggal 11-15 Maret 2019. dengan peserta dari 17 Provinsi (Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalut, Sulsei, Sulteng, Sultra, Sulut, Sulbar, Gorontalo, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat). Dengan peserta pusat dan daerah  $\pm 1000$  orang.

# MEKANISME PELAKSANAAN & TATACARA PENGISIAN FORMAT KORTEKRENBANG 2019

Direktorat Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah  
Ditjen Bina Pembangunan Daerah



Rapat Persiapan Teknis Rakortekrenbang  
Jakarta, 25 Januari 2019





## OUTLINE

1

Tatacara Pengisian Format  
Rakortekrenbang (Form 0-1-4)

2

Mekanisme Pembagian Desk dan  
Waktu Pembahasan

3

Mekanisme Verifikasi dan Shortlist  
Usulan

4

Prioritas Nasional 2020



**1**

# Tatacara Pengisian Format Rakortekrenbang (Form 0-1- 4)



# Tatacara Pengisian Form 0

## Format 0 – Target Sasaran Pembangunan Nasional

No.	NASIONAL					DAERAH						KESEPAKATAN TARGET NASIONAL DENGAN DAERAH	CATATAN KESEPAKATAN	
	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (Tahun n)	LOKASI	TARGET NASIONAL YANG MENJADI BEBAN DAERAH	ISU STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (Tahun n)	CAPAIAN Tahun n-2 (BASELINE)	TARGET (Tahun n-1)		PRAKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
.. Dst														

Format 0 merupakan format penyelarasan Target Sasaran Pembangunan Nasional antara target yang ditetapkan pusat dengan kemampuan pencapaian di daerah yang merupakan kontribusi antara K/L dengan Pemda

Sasaran Pembangunan Nasional dimaksud merupakan turunan dari sasaran makro pembangunan yang dapat dijabarkan dalam target sasaran yang menjadi beban antara pusat dan daerah

No.	Sasaran/Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatnya produksi pangan (juta ton)				
a.	Produksi padi				
b.	Produksi jagung				
c.	Produksi kedelai				
d.	Produksi gula				
e.	Produksi daging sapi				
f.	Produksi ikan	11,9 <sup>bi</sup>	13,6 <sup>bi</sup>	17,4	18,8
g.	Produksi garam	0,1 <sup>bi</sup>	1,1 <sup>bi</sup>	4,1	4,5
2	Meningkatnya akses pangan				
	Perubahan harga beras (persen)	3,3 <sup>bi</sup>	0,3 <sup>bi</sup>		0,5
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan				
a.	Konsumsi kalori (Kkal)	2.040 <sup>bi</sup>	2.115 <sup>bi</sup>	2.150	2.150
b.	Konsumsi ikan (kg/kp/tahun)	47,2 <sup>bi</sup>	46,5 <sup>bi</sup>	50,6	54,5



# Tatacara Pengisian Form 0

## Format 0 – Target Sasaran Pembangunan Nasional

No.	NASIONAL					DAERAH						KESEPAKATAN TARGET NASIONAL DENGAN DAERAH	CATATAN KESEPAKATAN	
	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (Tahun n)	LOKASI	TARGET NASIONAL YANG MENJADI BEBAN DAERAH	ISU STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (Tahun n)	CAPAIAN Tahun n-2 (BASELINE)	TARGET (Tahun n-1)		PRAKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
.. Dst														

Kolom 2 merupakan Sasaran dari sub Agenda Prioritas atau Sasaran Utama dari Prioritas Nasional (dalam RPJMN) serta merupakan Sasaran strategis dari Agenda Prioritas (dalam Renstra K/L)x

Kolom 2-6 bersumber dari Rancangan RPJMN 2020-2024 atau Rancangan Renstra K/L 2020-2024 (tahun rencana 2020) atau Rancangan RKP 2020 yang diambil dari aplikasi **Krisna RKP** (Pra Rakortek)

Untuk pengisian kolom 2-6 akan diisi oleh penanggungjawab PN di bappenas bersama mitra K/L nya, yang berkoordinasi dengan Dit. SUPD (Pra Rakortek)

Perhitungan angka final sasaran makro akan selesai di awal february untuk kemudian diturunkan menjadi sasaran per bidang atau urusan (Pra Rakortek)



# Tatacara Pengisian Form 0

## Format 0 – Target Sasaran Pembangunan Nasional

No.	NASIONAL					DAERAH						KESEPAKATAN TARGET NASIONAL DENGAN DAERAH	CATATAN KESEPAKATAN	
	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (Tahun n)	LOKASI	TARGET NASIONAL YANG MENJADI BEBAN DAERAH	ISU STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (Tahun n)	CAPAIAN Tahun n-2 (BASELINE)	TARGET (Tahun n-1)		PRAKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
.. Dst														

Kolom 7-10 merupakan usulan Target Sasaran Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam dokumen rencana atau rancangan dokumen rencana daerah yang merupakan kontribusi terhadap capaian Sasaran Pembangunan Nasional

Kolom 7 adalah rumusan isu strategis yang mendasari penetapan sasaran pembangunan daerah dalam dokumen rencana atau rancangan dokumen rencana daerah

Kolom 8-10 adalah rumusan sasaran pembangunan daerah beserta indikator dan target yang ditetapkan dalam dokumen rencana atau rancangan dokumen rencana daerah (RPJMD atau Rancangan RPJMD dan Rancangan RKPDP Tahun 2020)

Kolom 11 & 12 adalah realisasi atau capaian dari sasaran pembangunan daerah sampai dengan tahun n-2 (tahun 2018) dan target yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun 2019), sebagai dasar penentuan target sasaran pembangunan yang ditetapkan daerah

Untuk pengisian Kolom 7-12 dapat dilakukan awal february melalui aplikasi **Krisna Selaras**





# Tatacara Pengisian Form 0

## Format 0 – Target Sasaran Pembangunan Nasional

No.	NASIONAL					DAERAH						KESEPAKATAN TARGET NASIONAL DENGAN DAERAH	CATATAN KESEPAKATAN	
	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (Tahun n)	LOKASI	TARGET NASIONAL YANG MENJADI BEBAN DAERAH	ISU STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (Tahun n)	CAPAIAN Tahun n-2 (BASELINE)	TARGET (Tahun n-1)		PRAKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
.. Dst														

- Kolom 13-15 merupakan kolom kesepakatan terhadap target pembangunan nasional beserta prakiraan kebutuhan anggaran dan indikasi sumber pendanaan
- Pengisian kolom 13-15 dilakukan pada saat pembahasan desk Rakortekrenbang

- Kolom 13 adalah kesepakatan terhadap angka target sasaran pembangunan nasional dengan melakukan penyesuaian terhadap target yang ditetapkan Pusat atau target yang ditetapkan daerah
- Kolom 14 adalah prakiraan terhadap kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target pembangunan nasional yang disepakati jika terdapat gap antara target hasil kesepakatan dengan target yang ditetapkan daerah
- Kolom 15 adalah penentuan indikasi sumber pendanaan



# Tatacara Pengisian Form 1

## Format 1 – Program/Kegiatan dan Proyek K/L yang mendukung Prioritas Nasional

No.	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL						KESEPAKATAN				KET
			USULAN K/L			USULAN DAERAH			PROYEK	TARGET	LOKASI	PRAKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN	
			PROYEK	TARGET	LOKASI	PROYEK	TARGET	LOKASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
.. Dst													

Kolom 2-3 adalah Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020 yang dijabarkan dari Prioritas Nasional Tahun 2020 (Pra Rakortek)

Kolom 4-6 adalah daftar rencana Proyek Prioritas Nasional yang diusulkan K/L dalam Rancangan Renja K/L Tahun 2020 melalui aplikasi **Krisna RKP** (Pra Rakortek)

Kolom 7-9 adalah daftar usulan daerah terhadap Proyek Prioritas Nasional (kewenangan pusat) yang diinput melalui aplikasi **Krisna Selaras** (Pra Rakortek)

Kolom 10-13 adalah daftar usulan proyek prioritas nasional yang disepakati dalam pembahasan desk Rakortek, yang dinilai berdasarkan dampak yang signifikan terhadap pencapaian PN dan komitmen daerah dalam mendukung pencapaian PN



# Tatacara Pengisian Form 4

## Format 4 – Program/Kegiatan dan Proyek K/L yang mendukung Prioritas Daerah

No.	PRIORITAS DAERAH	USULAN DAERAH (Kewenangan Pusat)					KESEPAKATAN			KET
		PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT K/L	PROYEK K/L	TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN ANGGARAN	DISETUJUI	TIDAK	CATATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
.. Dst										

Kolom 2 adalah sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2020, yang bersumber dari Rancangan RKPD Tahun 2020

Kolom 3-7 adalah daftar usulan daerah terhadap Program/Kegiatan atau Proyek K/L (kewenangan pusat) yang dibutuhkan daerah atau sesuai dengan Prioritas Daerah, yang diinput melalui aplikasi **Krisna Selaras** (Pra Rakortek)

Kolom 8-10 adalah daftar usulan proyek K/L yang disepakati dalam pembahasan (Desk Rakortek), yang dinilai sesuai antara Agenda Prioritas K/L dengan Prioritas daerah



**2**

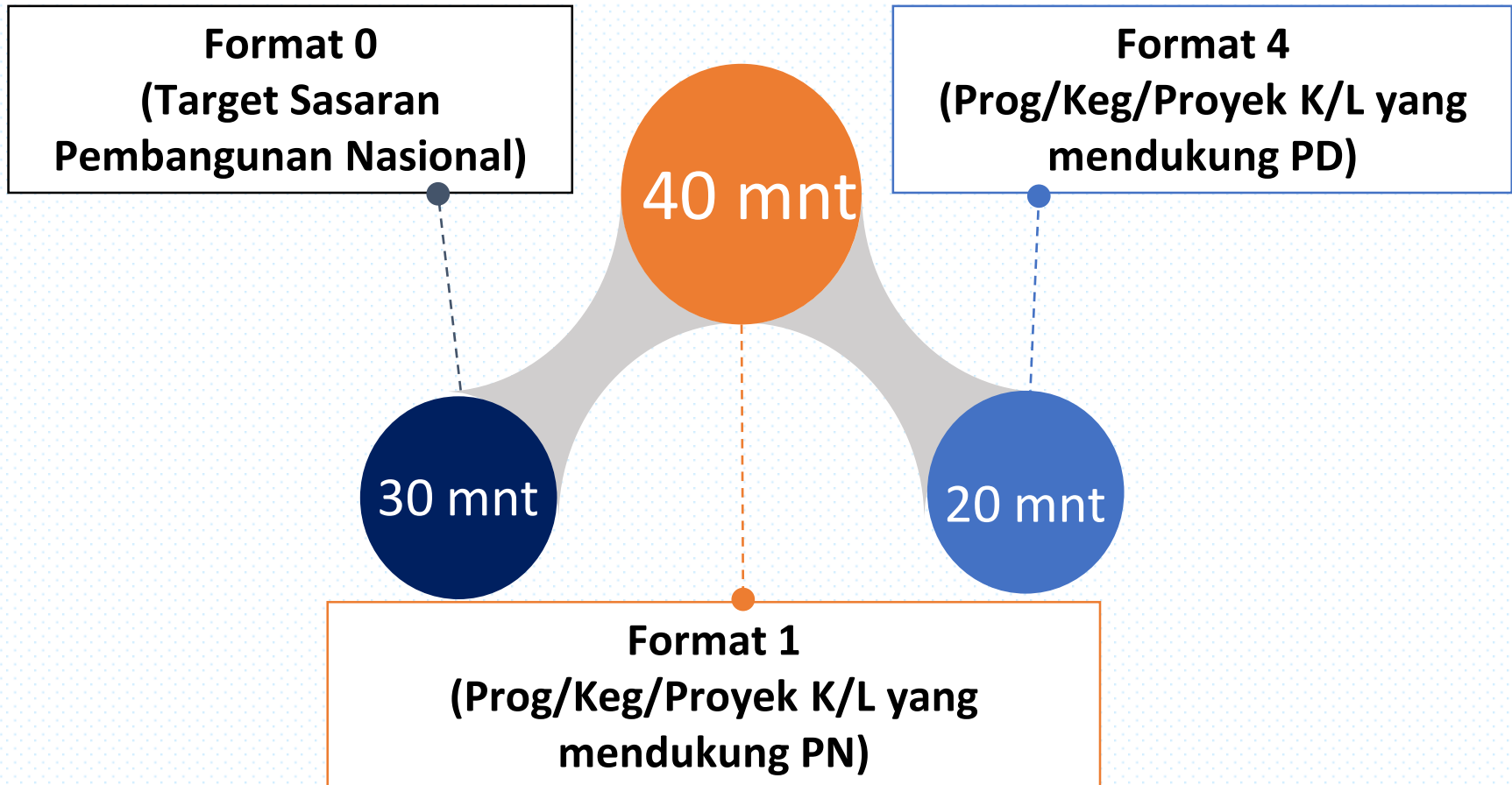
## Mekanisme Pembagian Desk & Waktu Pembahasan

# Referensi Awal - K/L Pendukung Utama PN 2020

Direktorat	Subdit	Jumlah Desk	K/L	Prioritas Nasional
SUPD I	Pertanahan dan Tata Ruang	1	Kemen ATR/BPN	PN5
	ESDM	1	Kemen ESDM	PN4
	Pertanian dan Pangan	2	Kementerian Pertanian	PN2, PN3, PN4
			Badan Ketahanan Pangan Nasional	
	Lingkungan Hidup	1	KemenLHK	PN3,PN4
Kehutanan				
SUPD II	PU	1	Kementerian PU dan PR	PN2, PN1, PN4
	Perkim			
	Perhubungan	1	Kementerian Perhubungan	PN2
	KKP	1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	PN2, PN3, PN4
	2	Kemenkominfo BPS	PN2	
SUPD III	Kesehatan	1	Kementerian Kesehatan	PN1
	Sosbud	1	Kementerian Sosial	PN1
	Perindustrian dan Perdagangan	2	Kementerian Perdagangan	PN3
			Kementerian Perindustrian	
	Pariwisata, PMD dan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri	3	Kementerian Pariwisata	PN1, PN2, PN3, PN5
			Ditjen PMD Kemendagri Ditjen Dukcapil Kemendagri	
Koperasi UKM dan Penanaman Modal	2	Kementerian Koperasi dan UKM BKPM	PN3	
SUPD IV	Pendidikan	1	Kemendikbud	PN1, PN3
	PPPA	1	KemenPPPA	PN1
	Pengendalian Penduduk dan KB	1	BKKBN	PN1
	Kepemudaan dan Olahraga, Kearsipan dan Perpustakaan	1	Perpusnas	PN1
	Nakertrans	2	Kementerian Tenaga Kerja	PN2, PN3
Kemendes dan PDT dan Transmigrasi				
<b>TOTAL</b>		<b>25</b>		



## Waktu Pembahasan Desk (90 mnt)



### Catatan Perbaikan untuk Rakortek 2019

- Jumlah desk pembahasan perlu difokuskan untuk optimalisasi pembahasan format 0,1 dan 4
- Untuk desk Otsus, KPBU, BNPP, Adwil (Bencana), perlu penggabungan atau perampingan



**3**

## Mekanisme Verifikasi dan Shortlist Usulan



# Mekanisme Verifikasi Usulan Daerah

- Daerah menginput form Kontribusi APBD terhadap pencapaian PN, sebagai bahan penilaian komitmen daerah dalam mendukung pencapaian PN
- Bappeda memverifikasi usulan daerah, dengan menyaring usulan yang sudah tertuang dalam usulan K/L, maupun yang tidak terkait dengan pencapaian PN
- Verifikasi Direktorat SUPD:
  - **Usulan Form 1** → dengan **menilai** usulan mana yang berdampak **signifikan** atau outputnya berdampak **langsung** terhadap pencapaian PN, untuk kemudian masuk sebagai **shortlist** usulan
  - **Usulan Form 4** → dengan **menilai** usulan yang sesuai dengan Prioritas Daerah namun merupakan kewenangan Pusat, untuk kemudian masuk sebagai **shortlist** usulan





# Mekanisme Verifikasi Usulan Daerah

Form 1

No.	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL						KESEPAKATAN				KET
			USULAN K/L			USULAN DAERAH			PROYEK	TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN ANGGARAN	
			PROYEK	TARGET	LOKASI	PROYEK	TARGET	LOKASI					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

70  
Usulan



Form 1

No.	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL						KESEPAKATAN				KET
			USULAN K/L			USULAN DAERAH			PROYEK	TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN ANGGARAN	
			PROYEK	TARGET	LOKASI	PROYEK	TARGET	LOKASI					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

10  
Usulan

Dari **longlist** usulan pada Form 1, dilakukan **penyaringan** dengan **menilai** usulan mana yang berdampak **signifikan** atau outputnya berdampak **langsung** terhadap pencapaian PN, untuk kemudian dibuat **shortlist** usulan

**Shortlist** usulan hasil penyaringan, merupakan usulan yang akan **dibahas** pada desk Rakortekrenbang



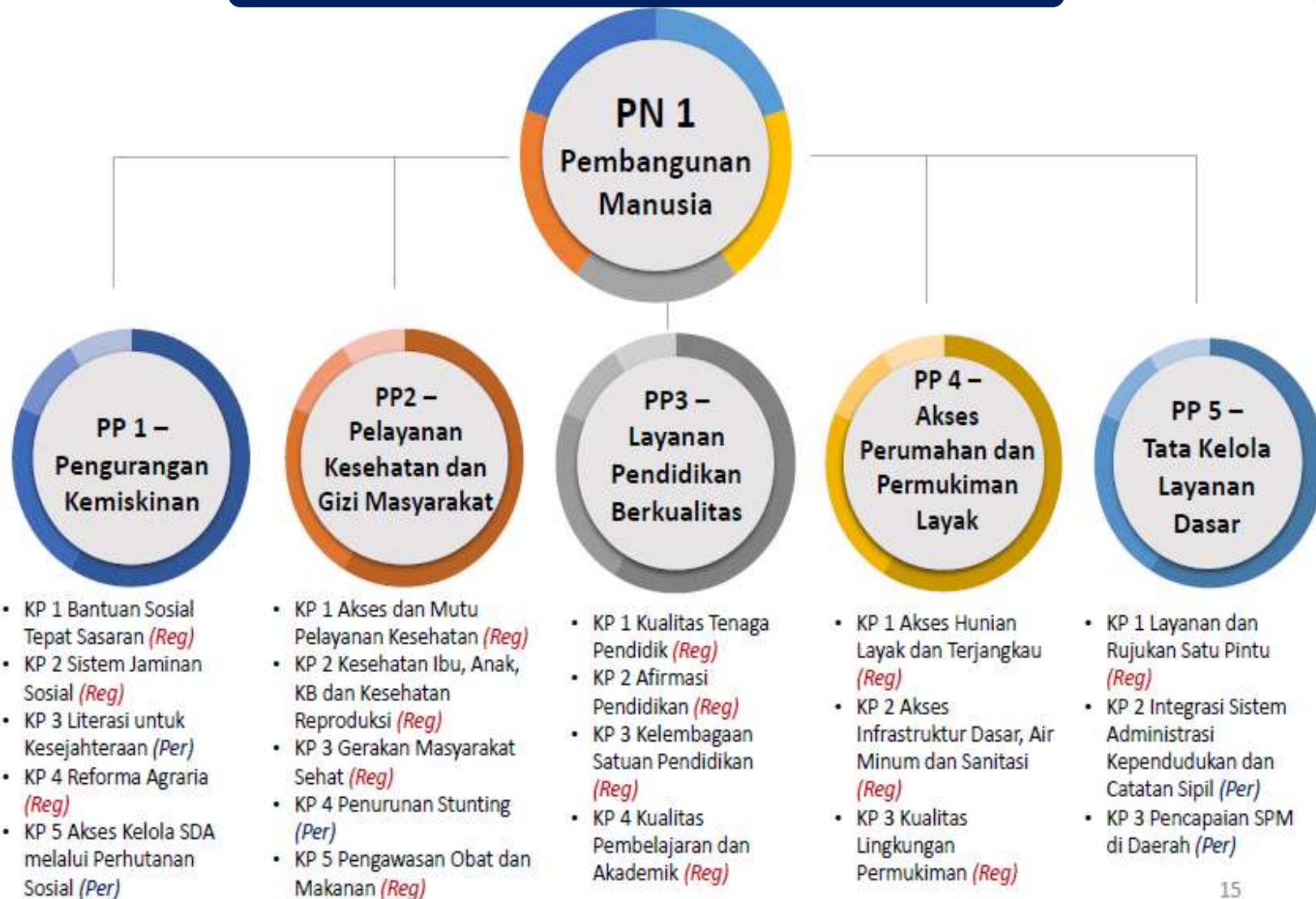


**4**

# Prioritas Nasional 2020

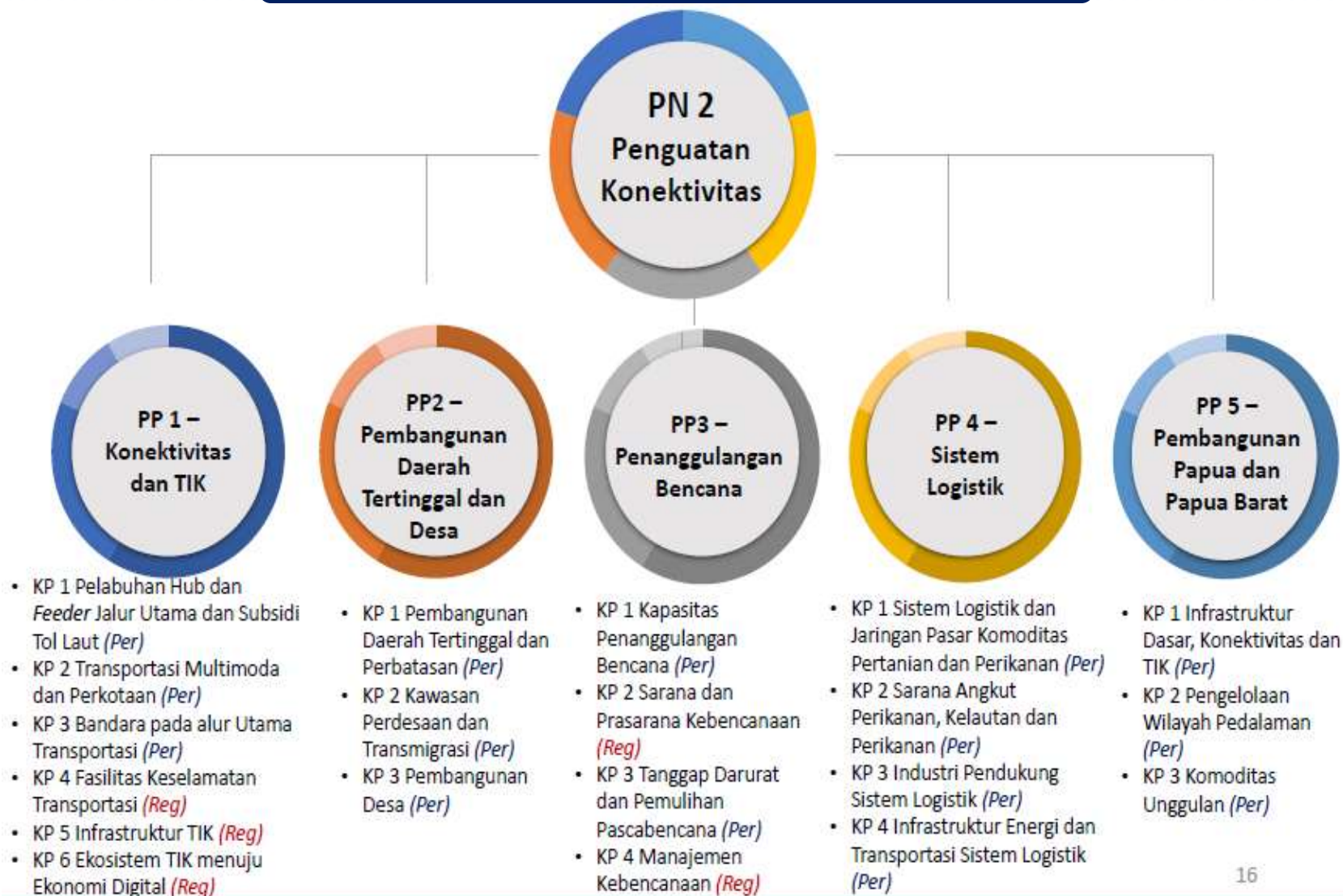


# Referensi Awal Program Prioritas & Kegiatan Prioritas Tahun 2020



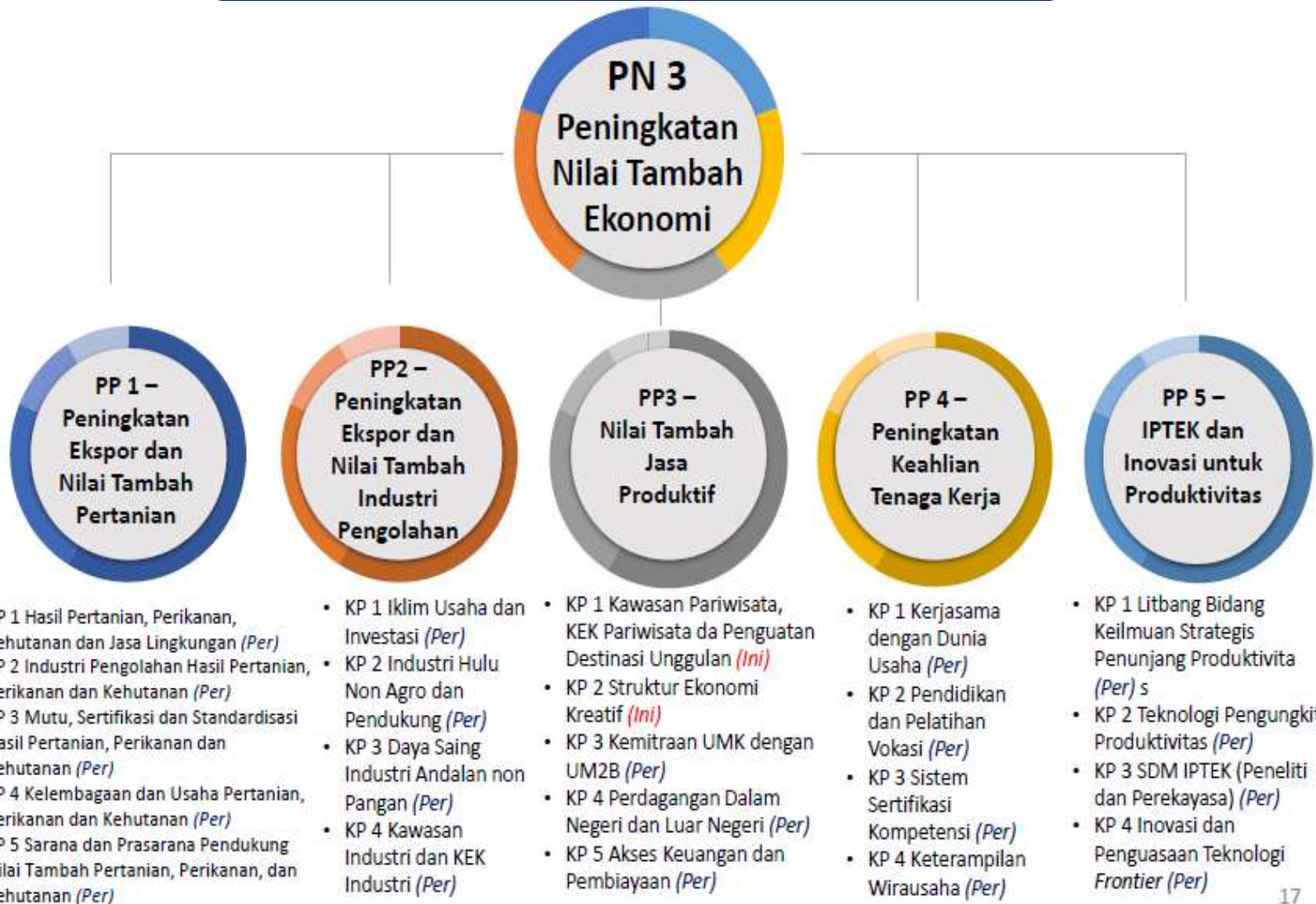


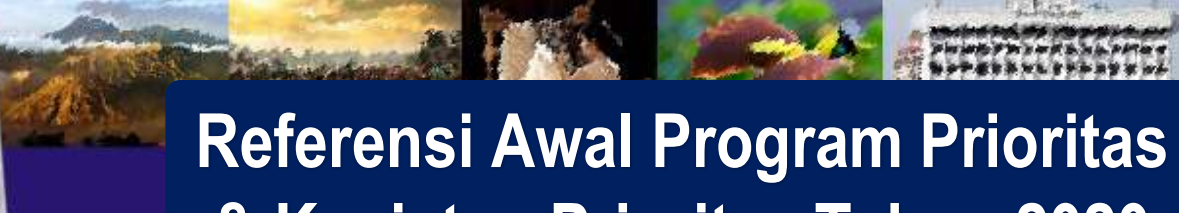
# Referensi Awal Program Prioritas & Kegiatan Prioritas Tahun 2020



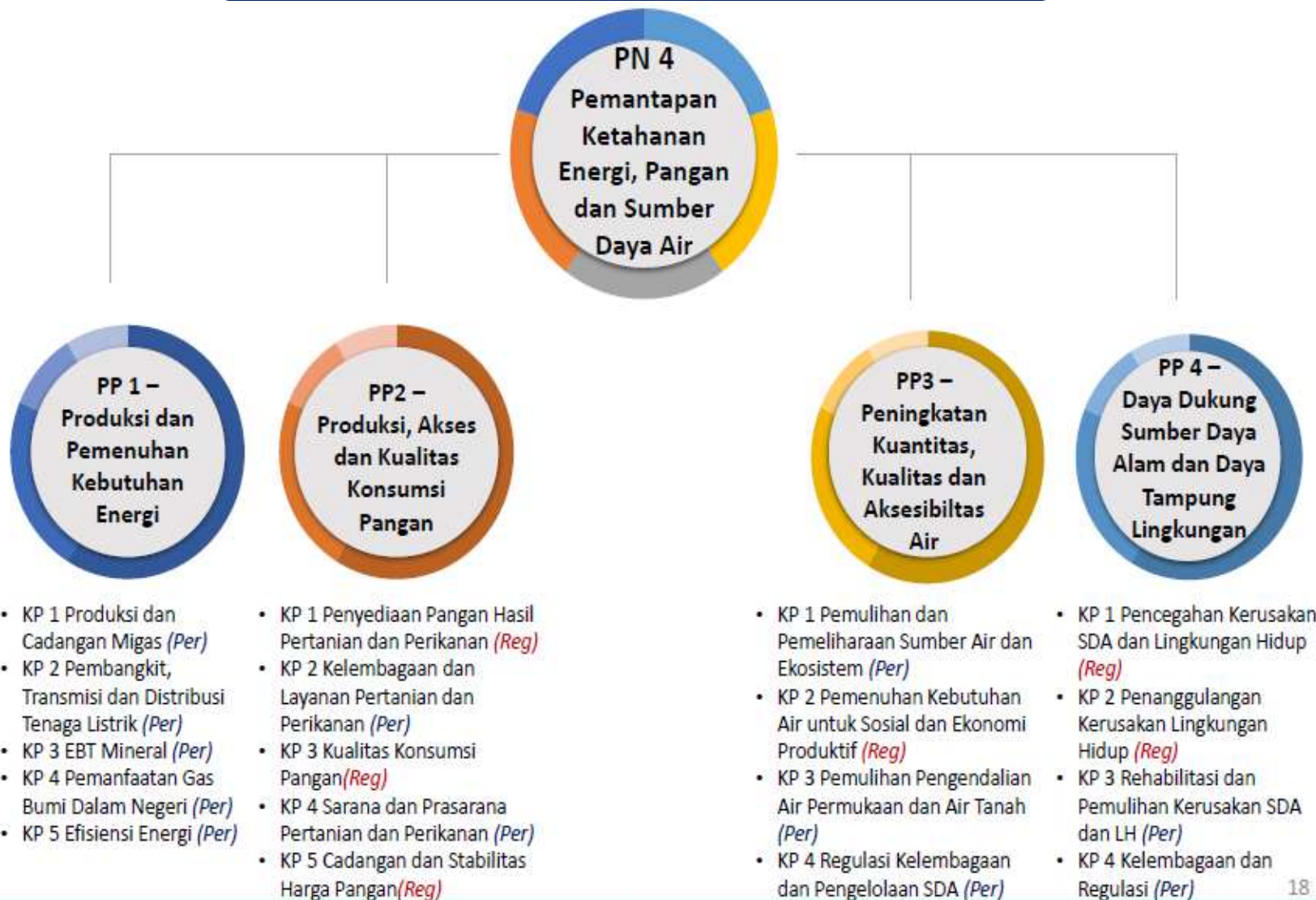


# Referensi Awal Program Prioritas & Kegiatan Prioritas Tahun 2020





# Referensi Awal Program Prioritas & Kegiatan Prioritas Tahun 2020





# Referensi Awal Program Prioritas & Kegiatan Prioritas Tahun 2020



- KP 1 Kondisi Keamanan Nasional *(Reg)*
- KP 2 Penanganan Konflik Sosial *(Reg)*
- KP 3 Penanganan Penyalahgunaan Narkoba *(Reg)*
- KP 4 Kelembagaan Siber serta Identifikasi, Deteksi, Proteksi Penanggulangan dan Pemulihan Dampak Kejahatan *(Reg)*
- KP 5 Penanggulangan Terorisme *(Reg)*

- KP 1 Lembaga Demokrasi *(Reg)*
- KP 2 Hak-Hak Politik dan Kebebasan Sipil *(Reg)*
- KP 3 Pengamanan Pemilihan Umum *(Reg)*
- KP 4 Netralitas Birokrasi dalam Pemilihan Umum *(Reg)*
- KP 5 Kualitas dan Keterbukaan Informasi *(Reg)*

- KP 1 Pertahanan Wilayah Nasional *(Reg)*
- KP 2 Pengamanan Kawasan Perbatasan dan Kedaulatan Negara *(Reg)*
- KP 3 Pertahanan Berdaya Gantar Tinggi *(Reg)*

- KP 1 Penegakan Hukum *(Reg)*
- KP 2 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi *(Reg)*
- KP 3 Integrasi e-government *(Ini)*
- KP 4 *Talent Management* Nasional *(Reg)*

- KP 1 Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri *(Reg)*
- KP 2 Diplomasi Maritim, Politik dan Keamanan *(Reg)*
- KP 3 Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Internasional *(Reg)*
- KP 4 Peran Indonesia di ASEAN *(Reg)*





**TERIMA KASIH**